RENSTRA 2022 - 2027

Rencana Strategis

Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ridho dan HidayahNya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sampai dengan 2027 hingga selesai.

Penyusunan Renstra ini sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial selama lima tahun ke depan dan juga sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dinas. Dokumen Renstra ini sekaligus sebagai media informasi untuk para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja, mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lain di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sampai dengan 2027, semoga dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Yogyakarta, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si

NIP. 19660404 199303 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1 Maksud 5
2 Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **7**
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatDaerah 19
1. Peluang 19
2. Tantangan 20

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **21**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 21
1. Kemiskinan 21
2. Perlindungan Anak 22
3. Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 23
4. Penanggulangan Bencana 24
5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 25
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota 28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis 37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 54

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN **57**
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 57

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **60**

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **63**

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **70**

BAB 8 PENUTUP **72**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, sedang di Daerah RPJM Daerah.

Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan rancangan awal dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua SKPD, dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD dalam hal ini Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial DIY mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Alur pemikiran yang termaktub dalam Restra-SKPD harus tetap mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah .

Rencana Strategis Dinas Sosial DIY Tahun 2022-2027 ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun

2022-2027 serta norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Renstra OPD dengan dokumen RPJMD dan RKPD

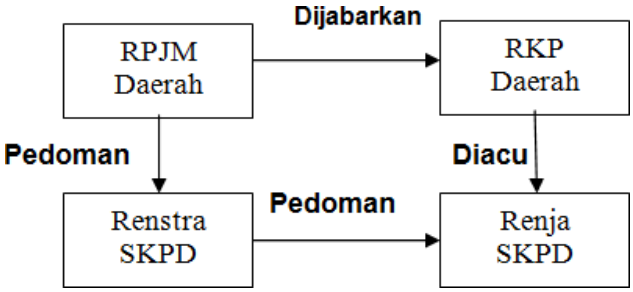

Penyusunan Renstra Dinas Sosial DIY juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issu strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan. Selain itu, juga mengacu pada Renstra Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta issue strategis. sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan kecenderungan di masa datang, diharapkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2022-2027 dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunannya perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam mensikapi dinamika pembangunan dan permasalahan kesejahteraan sosial baik pada tingkat lokal, antar wilayah, dan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Gambar 1.2

Bagan Penyusunan Renstra SKPD

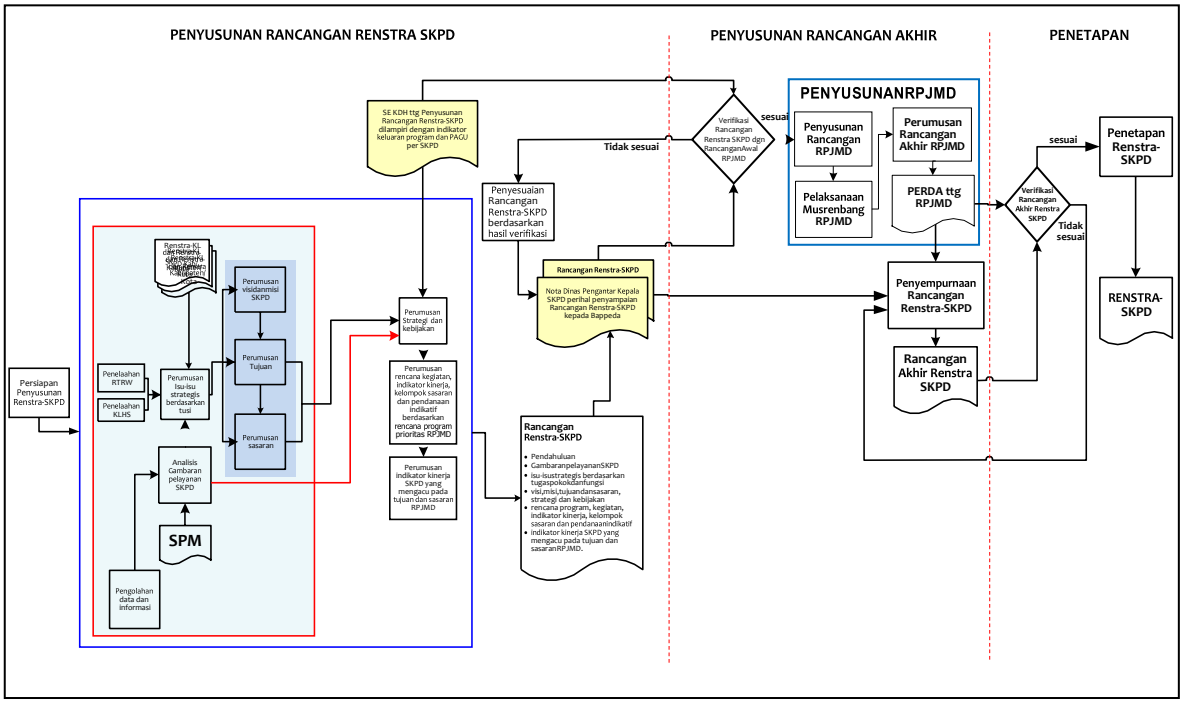

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
19. Keppres RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
20. Keppres RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite PenanggulanganKemiskinan;
21. Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
22. Keppres RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan

dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di DaerahKabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
27. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
28. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PEGHUK/2002 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Departemen Sosial RI;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2022-2027
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1.3 Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Sosial DIY ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial pada Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022-2027 sekaligus memberikan arah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial DIY sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Tujuan

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial untuk 5 {lima} tahun ke depan secara terpadu, terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

b. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unit kerja Dinas Sosial dan stakeholder terkait dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan.
c. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tanggal 30 Desember 2022 menetapkan bahwa Dinas Sosial DIY mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas Sosial DIY terdiri atas:

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Keuangan
c. Bidang Rehabilitasi Sosial
d. Bidang Perlindungan Sosial
e. Bidang Jaminan Sosial
f. Bidang Pemberdayaan Sosial
g. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
    1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas(BRTPD);
    2. Balai Perlindungandan Rehabilitasi Sosial Wanita(BPRSW);
    3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras(BRSBKL);
    4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja(BPRSR);
    5. BalaiRehabilitasiSosialdanPengasuhanAnak(BRSPA);dan
    6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha(BPSTW).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

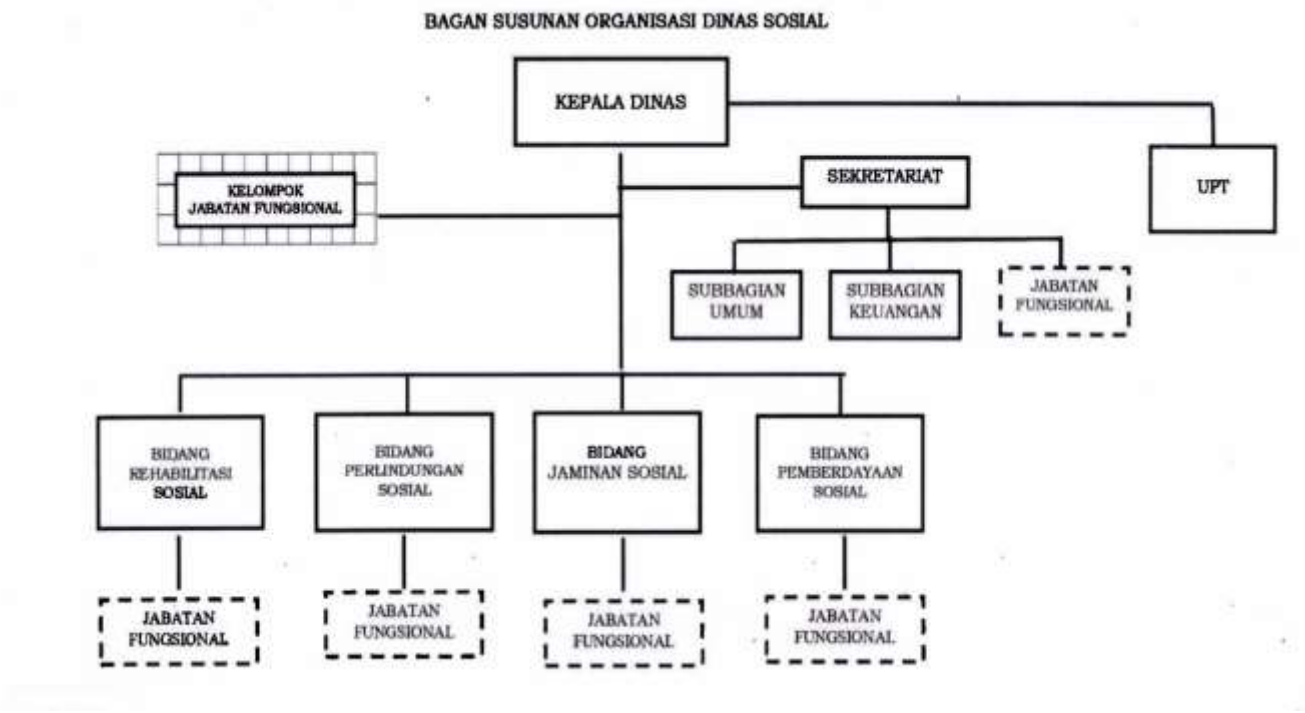

Dinas Sosial DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial DIY mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
3. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
4. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
5. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
6. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
8. pengembangan program bidang sosial;
9. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
10. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
12. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
13. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
14. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
15. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
16. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai saat ini urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (termasuk UPTD) dengan jumlah pegawai per Desember 2022 seluruhnya sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang. Menurut data kepegawaian per Desember 2022, terklasifikasi berdasarkan :

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana	18
2	Sarjana	84
3	D III	51
4	D II	5
4	SLTA sederajat	55
5	SLTP sederajat	2
6	SD	5
	Jumlah	220

2. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama (IV/c)	2
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	10
3	Pembina (IV/a)	10
4	Penata Tk. I (III/d)	39
5	Penata (III/c)	16
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	49
7	Penata Muda (III/a)	34
8	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	16
9	Pengatur (II/c)	31
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
11	Pengatur Muda (II/a)	5
12	Juru Tk. I (I/d)	0
13	Juru (I/c)	3
14	Juru Muda Tk. I (I/b)	0
15	Juru Muda (I/a)	0
Jumlah		220

3. Jabatan Struktural

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat eselon III	11
3	Pejabat Eselon IV	14
	Jumlah	26

4. Jabatan Fungsional

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Pejabat fungsional	Jumlah (Orang)
1	Arsiparis	0
2	Penyuluh Sosial	10
3	Pekerja Sosial	32
4	Perawat	20
5	Fisioterapis	2
6	Instruktur	2
7	Nutrisionis	2
8	Perencana	1
9	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
	Jumlah	70

5. Jenis Kelamin

Tabel. 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dinas / UPT	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dinas Induk	30	34
2	BRTPD (Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas)	15	16
3	BPRSW (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)	7	16
4	BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)	13	18
5	BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)	8	14

No	Dinas / UPT	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
6	BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak)	12	8
7	BPSTW (Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha)	12	17
	Jumlah	97	123

Adapun jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6. Jumlah Ideal Pegawai

No	Dinas / UPT	Jumlah Ideal	Kondisi Sekarang	Kekurangan /Kelebihan
1	Dinas Induk	84	64	-20
2	BRTPD (Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas)	28	31	+3
3	BPRSW (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)	27	23	-4
4	BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)	41	31	-10
5	BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)	27	22	-5
6	BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak)	31	20	-11
7	BPSTW (Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha)	32	29	-3
	Jumlah	270	220	-50

6. Jumlah dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana

Tabel. 2.7. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Induk dan UPT

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
1	Tanah; Kantor Dinas Janti, Kusumanegara 9, PPW, Jaranan, Lempuyangan, Demangan, TMP (4 monumen dan lapangan pancasila), LBK (5 kab/Kota), Monumen Bibis	113.329 m2
2	Bangunan gedung dan monumen	263 Unit
3	Kendaraan Roda Enam	4 Unit
4	Kendaraan Roda Empat	22 unit
5	Kendaraan Roda Tiga	4 unit
6	Microbus	15 unit
7	Ambulance	10 unit
8	Sepeda Motor	46 unit
9	Komputer	114 unit
10	Komputer yang terhubung internet	114 unit
11	Laptop	102 unit
12	LCD	26 buah
13	Jaringan Internet (Provider)	4 unit
14	Modem	3 unit
15	Genset	13 unit
16	Handy Talky (HT)	76 unit

7. Luas Bangunan dan Daya Tampung UPT Dinas Sosial DIY

Tabel. 2.8 Luas Bangunan dan Daya Tampung UPT Dinas Sosial DIY

No	U P T	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Daya Tampung (org)
1	BRTPD (Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas)-*Sultan Ground*	39.000	13.000	185
2	BPRSW (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)	9.995	1.694	70
3	BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras) Kalasan Sleman Bener Yogyakarta	20.922 22.882	3.068 1.492	250 50
4	BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)	23.947	10.211	80
5	BRSPA (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak) - Bimomartani – *Sultan Ground* - Budhi Bhakti	13.473 3.446	3.468 1.833	80 60
6	BPSTW (Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha) - Pakem Sleman - Kasongan Bantul	9.702 7.356	2.887 787	120 94

Kondisi riil sarana dan prasarana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah kendaraan roda 2 sebanyak 46 unit (Dinas Induk dan UPT). Jumlah tersebut kurang mencukupi dan yaitu 50 % kendaraan roda 2 yang ada diproduksi antara Tahun 1997 s.d 2001 dan 50% nya antara Tahun 2002 dan 2014. Jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit (Dinas Induk dan UPT). Dari segi kuantitas dan kualitas kurang memenuhi sejumlah 50 % sedangkan 50 % lainnya sudah memenuhi.

Komputer/Laptop/Printer (Sarana Kerja). Jumlah komputer sebagai prasarana kerja sebanyak 114 unit, sedangkan jumlah pegawai sebanyak 220 orang. Komputer sejumlah 70 % diproduksi Tahun 2000 s.d 2010 dan 30 % diproduksi tahun 2011 s.d. 2022. Jumlah laptop sebanyak 102 buah tersebut masih kurang mencukupi karena pada setiap pekerjaan dituntut dengan aplikasi yang hanya dapat diinstal pada laptop dengan spesifikasi tertentu dan ada beberapa laptop yang sudah tidak bisa digunakan.

Dari kondisi tersebut di atas maka jumlah ideal sarana dan prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan idealnya adalah setiap bidang idealnya memiliki 2 armada roda 4 dan setiap seksi memiliki 3 unit kendaraan roda 2 yang kondisinya layak pakai. Untuk komputer, idealnya setiap seksi memiliki minimal 4 unit beserta printernya dalam kondisi layak serta mengikuti perkembangan IT untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang menggunakan aplikasi dengan spesifikasi komputer yang didukung IT serta memiliki laptop yang idealnya 4 laptop untuk beberapa aplikasi tertentu sebagai sarana dan prasarana pendukung pekerjaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikato Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial				42.38	40.97	42.17	43.08	44.28	43.74	42.17	43.85	40.91	47.27	103.21	102.93	103.98	94.96	106.75
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasiny a dalam penyelenggar aan kesejahteraa n sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawana n dan kesetiakawanan sosial				63.40	51.56	51.57	51.58	51.59	51.64	51.72	45.35	69.64	65.34	100.16	100.29	87.92	134.99	126.63

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	34.602.772.269	47.380.550.679	45.457.655.707	103.085.207.542	128.135.177.242	32.910.765.131	43.985.305.942	41.520.180.876	89.699.907.923	114.920.064.002	95,11	92,83	91.33	87.02	89.69		
Belanja Tidak Langsung (Gaji)	17.062.811.142	15.920.100.363	22.988.955.422			15.907.565.376	15.276.266.844	20.792.506.269			98,37	95,95	90,44				

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima Tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. Walaupun di tahun 2020 semua sektor pembangunan lumpuh karena Pandemi Covid -19. Tingkat kemiskinan kembali naik di tahun 2020 setelah menunjukkan tren menurun sejak 2016 hingga 2019. Pada tahun 2019 berada di angka 11.7% dan 2020 menjadi 12.8%. Namun Pandemi ini pula yang membawa perubahan besar pada pemanfaat jaringan online pada semua sektor pembangunan.

Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun, RPJMD 2017-2022 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

Perubahan tersebut karena adanya penyempurnaan dalam RPJMD dan terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga Renstra OPD ikut menyesuaikan atas perubahan tersebut.

Kinerja Dinas Sosial berdasarkan capaian selama 2017-2022 menunjukan hasil yang bagus. Pada tahun 2018 dan 2019, Kinerja Dinas Sosial DIY yang dipresentasikan pada dua indikator (PPKS dan PSKS) menunjukan capaian melebihi 100%. Hal ini berarti Dinas Sosial melakukan pelayanan lebih dari yang sudah ditargetkan. Namun pada tahun 2020 capaian PSKS tidak mencapai 100% dan pada tahun 2021 capaian indikator PPKS tidak mencapai 100% hal ini jelas karena ada pergeseran prioritas anggaran terkait penanganan Pandemi Covid. Pada tahun 2022 indikator PPKS dan PSKS tercapai melebihi target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatDaerah

1. Peluang

a. Kebijakan pro poor pro job yang menguatkan posisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial
b. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karier pegawai
c. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PPKS
d. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
e. Banyaknya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah DIY
f. Komitmen dari dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraansosial
g. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu penanganan PPKS
h. Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
i. Kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Yogyakarta
j. Kebijakan pengelolaan potensi bahari akan mendukung program penanggulangan kemiskinan

2. Tantangan

a. Harmonisasi kebijakan antara Pemerintah DIY dan kabupaten/Kota
b. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
c. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin
d. Perubahan iklim yang mempengaruhi kerentanan masyarakat di wilayah bencana termasuk bencana rawan pangan.
e. Sistem Tata niaga perdagangan yang kurang berpihak pada warga miskin sehingga memperkecil nilai tukar dan dayabeli.
f. Dunia usaha yang kurang memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PPKS yang telah diberdayakan.
g. Penyalahgunaan obat terlarang (napza) yang semakin meluas.
h. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana
i. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan
j. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
k. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapanhukum
l. Kebijakan kependudukan yang belum semua mengakomodir hak-hak kelompok marginal untuk mendapatkan identitas (KTP, KK dan akte, dan dokumen kependudukan lainnya)
m. Sebagian masyarakat masih belum menerima dan bersikap diskriminatif terhadap eks warga binaan sosial
n. Semakin menguatnya primodialisme berbasis etnis, golongan, aliran, agama yang berujung pada konflik sosial dan disintegrasi.
o. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya populer yang terbawa oleh arus globalisasi
p. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2021 sebanyak 3.742.896 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,61 persen (BPS, 2022). Pertumbuhan penduduk tersebut diiringi dengan kopleksitas permasalahannya, antara lain permasalahan di bidang sosial yang meliputi:

1. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 463,63 ribu jiwa atau 11,49 persen pada September 2022. Jumlah itu naik 0,15 persen atau 8,87 ribu jiwa dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 454,76 ribu jiwa atau 11,34 persen. Prosentase penduduk miskin DIY lebih besar dari angka rata-rata nasional yang sebesar 9.,57 persen. Garis kemiskinan DIY pada September 2022 meningkat menjadi Rp. 551.342,- bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 482.855,- Ketimpangan di DIY mengalami peningkatan pada tahun 2022 ditunjukan dengan Gini Ratio sebesar 0,459. Angkat tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 4,44.

Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Kondisi ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 5,53 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 69/HUK/2023 per tanggal 17 April 2023, warga DIY yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 2.062.601 jiwa menurun bila dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar 2.132.800 jiwa. Intervensi terhadap fakir miskin sudah banyak dilakukan melalui perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin yang sudah tidak produktif, dan bagi mereka yang masih produktif diintervensi melalui pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan dan koordinasi penyaluran BPNT, pendampingan dan koordinasi UEP PKH, dan UEP PKH Graduasi melalui BKK.

2. Perlindungan Anak

Jumlah anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial berdasarkan Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY tahun 2022 meliputi anak-anak yang termasuk kategori anak terlantar sejumlah 5.200 anak dan anak balita terlantar sejumlah 431 anak. Anak dan balita telantar ini merupakan anak yatim piatu yang memiliki keluarga atau kerabat dengan ekonomi yang tidak berkecukupan dan/atau tinggal di dalam keluarga miskin sehingga mengalami hambatan perkembangan dan fungsi sosial. Paradigma lama bahwa penanganan anak terlantar melalui pelayanan dalam panti menjadi solusi pilihan, saat ini tidak lagi relevan seiring dengan bergesernya kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pengasuhan berbasis keluarga, bukan berbasis panti/lembaga pengasuhan, maka pengasuhan dalam panti menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar.

Peringkat kedua yaitu Anak dengan kedisabilitasan, yang berjumlah 2.012 anak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan data pada tahun 2021 sebesar 1.971 anak (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022) . Anak dengan Kedisabilitasan atau disebut juga dengan Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum terpenuhi hak-haknya untuk bisa menikmati pendidikan di Sekolah Inklusi. Pada tahun 2012, Pemerintah DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemenuhan dan Perlindungan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas yang di dalamnya juga mempromosikan pendidikan inklusi. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial telah mengupayakan berbagai bentuk layanan untuk ADK tersebut dalam bentuk pelayanan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2022) yaitu pengasramaan SLB, Bantuan Sosial Anak dengan Kedisabilitasan melalui LKS.

Selain itu, permasalahan tentang anak berkembang semakin kompleks dengan munculnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang jumlahnya mencapai 222 anak, Anak yang Hidup di Jalan sebanyak 132 anak, Anak Korban Tindak Kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus sebanyak 25 anak (Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Hal ini memerlukan tindak lanjut perlindungan dan penanganan.

3. Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial teridentifikasi berjumlah 28.137 orang dan 2.012 anak dengan kedisabilitasan (Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Pada tahun 2012, Pemerintah DIY dan DPRD DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan mengakomodasi berbagai instrumen internasional yang terkait dengan hak- hak bagi penyandang disabilitas, termasuk di antaranya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang mengamanatkan agar Pemda DIY, Pemkab/Kota, dan Masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas tersebut, Dinas Sosial DIY memfasilitasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013. Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial bekerjasama dengan LKS yang menanganai permasalahan penyandang disabilitas.

Permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa ketugasan Provinsi melayani rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sangat terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar berbasis panti melalui Balai/ UPTD Dinas Sosial DIY. Sejauh ini pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Balai mengarah kepada rehabilitasi sosial dan vokasional, dimana fokusnya memberikan berbagai keterampilan, baik ilmu pengetahuan serta teknologi dalam upaya mengembalikan kemampuan untuk bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan fisiknya.

Rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif. Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat. Dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap usaha-usaha yang baru dirintis juga masih terbatas.

4. Penanggulangan Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara Gunung Merapi serta batas selatan Samudera Hindia memiliki potensi besar terhadap bencana. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan karts dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial. Sebanyak 291 atau 66,44% kelurahan di DIY merupakan wilayah rawan bencana (Dinas Sosial, 2021).

Korban Bencana alam tercatat sebanyak 21.908 orang dan korban bencana sosial sebanyak 59 keluarga (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS 2022). Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi usaha mitigasi penanggulangan bencana, bimbingan, supervisi, konsultasi di daerah rawan bencana, dan bantuan sosial korban bencana serta bantuan kepada orang terlantar. Pada kejadian Bencana Dinas Sosial mengarahkan sumber daya untuk menangani korban bencana melalui bantuan sosial (logistik) dan melakukan pendampingan sosial terhadap korban bencana. Dinas Sosial melatih Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor, serta Difabel Taruna Siaga Bencana (DIFAGANA). Untuk melaksanakan tugas mitigasi dan kesiapsigaan, dibentuk Kampung Siaga Bencana (KSB). Hal-hal tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal yang digunakan sebagai dasar tindakan pencegahan, sikap dan praktek hidup *hamemayu hayuning bawono* serta menjaga keguyuban dan kerukunan dalam menghadapi situasi bencana.

Pandemi Covid-19, yang muncul pada awal tahun 2020 merupakan salah satu permasalahan yang cukup menyita atensi serta pemanfaatan segala sumber daya

sebagai salah satu bencana. Covid-19 secara resmi ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dinas Sosial sebagai salah satu anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY yang turut bertanggung jawab dalam menyediakan shelter karantina bagi penyintas Covid-19.

5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Usia Harapan Hidup DIY mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 75,04, menjadi 75,08 di tahun 2022 (BPS, 2022). Meningkatnya Usia Harapan Hidup di DIY, menghasilkan kelompok lanjut usia yang meningkat. Berdasarkan sensus penduduk DIY tahun 2020, persentase penduduk berusia > 60 tahun DIY cukup tinggi sebesar 15,75 % (BPS DIY,2021). Hal ini berimplikasi terhadap penyediaan layanan dalam menjawab kompleksitas permasalahan terkait lansia. Harapanya seluruh lansia di DIY selalu sehat dan produktif. Namun faktanya meskipun usia harapan hidup di DIY tertinggi di tingkat nasional, kondisi kehidupan para lanjut usia masih banyak yang mengalami keterlantaran.

Jumlah lanjut usia DIY berdasarkan data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desember 2021 sebanyak 637.353 jiwa sedangkan yang merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dalam Pemutakhiran data PPKS dan PSKS 2022 sebanyak 26.525 jiwa. Lanjut Usia PPKS mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data 2021 sebesar 33.129 jiwa. Program-program pelayanan sosial lanjut usia mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia. Kebijakan perlindungan dan jaminan sosial merupakan model perlindungan sosial negara-negara yang menganut welfare state yang mampu memberi pelayanan yang luas kepada warganya. Namun kebijakan ini telah dikoreksi di sejumlah negara karena krisis ekonomi berkepanjangan sehingga negara sangat berat untuk membayarkan berbagai insurance yang sudah jatuh tempo, termasuk insurance untuk lanjut usia. Program perlindungan sosial juga masih sangat terbatas *coveragenya*, sehingga hanya mampu menjangkau sebagian kecil lanjut usia yang seharusnya memenuhi kriteria untuk memperoleh jaminan sosial.

Pelayanan sosial yang dilakukan Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun terakhir meliputi:

a. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dilaksanakan melalui sistem dalam panti dan luar panti. Di DIY terdapat satu Balai yang menangani Werdha yang dikelola oleh Dinas Sosial, yang terdapat pada dua unit, yaitu Budi Luhur, Bantul dan Abiyoso, Sleman.
b. Pelayanan *home care* maupun *day care*, dengan melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesejahteraan lanjut usia di luar panti ditujukan kepada lanjut usia atau keluarganya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial, juga diberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia yang masih produktif namun seiring dengan kewenangan maka selanjutnya sasaran hanya kepada lanjut usia tidak potensial.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Telaah Visi

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan keistimewaannya, dimana Gubernur DIY ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat, maka dalam merumuskan Visi dan Misi dibutuhkan keselarasan untuk menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur DIY, serta mengikuti realita permasalahan dan potensi yang dihadapi oleh masyarakat DIY.

Visi Gubernur DIY 2022-2027 yakni “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalu Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Pancamulia yang tertuang dalam Visi RPJMD 2012-2022, kembali diangkat sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 karena memiliki keterkaitan dan relevansi dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya Pancamulia, yang hadir untuk menjawab isu strategis di DIY, dapat diukur melalui capaian-capaian yang diukur dengan beberapa ukuran, yaitu :

a. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan DIY;

b. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
c. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram;
d. Kehidupan ekonomi yang layak;
e. Mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah;
f. Good Governance pada berbagai tingkatan.

Dinas Sosial DIY memiliki kontribusi dan posisi strategis dalam pencapaian Pancalima yang diangkat kembali dalam Visi dan Misi Gubernur Tahun 2022-2027. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial DIY yang menyelenggarakan pelayanan sosial dasar menjamin kemuliaan martabat warga Yogyakarta, terlebih bagi warga masyarakat yang masih berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, khususnya bagi warga masyarakat yang masih hidup dengan kemiskinan serta warga lain yang masih mengalami eksklusi sosial akibat stigma dan diskriminasi sosial. Di wilayah DIY tidak lagi ditemukan warga yang berada dalam kemiskinan mutlak atau mengalami disparitas yang terlalu ekstrim, namun ketimpangan sosial masih cukup tinggi yang dinilai dari Indeks Gini maupun indek Williamson. Ketimpangan yang melebar dan berlangsung lama apabila tidak ditangani akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta penderitaan psiko sosial yang akan menyerang martabat manusia. Tugas Dinas sosial DIY dalam menanggulangi kemiskinan secara lansgung akan menangani ketimpangan dan kesenjangan sosial dan menjaga dan menjamin warga miskin dapat hidup secara bermartabat.

2. Telaah Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, diturunkan menjadi empat Misi dengan berorientasi pada cara atau langkah atau sikap yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Visi. Ke empat Misi yang sudah dirumuskan yakni :

a. Meningkatkan kulitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan;
b. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;

c. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
d. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang baik.

Dari telaah Visi dan Misi Gubernur Tahun 2022-2027, Dinas Sosial DIY menjadi organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam mewujudkan kemuliaan martabat manusia di DIY. Menjaga dan menjunjung martabat manusia adalah prinsip dasar yang mempedomani seluruh penyelenggaraan pelayanan sosial dasar. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial DIY berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Tahun 2022-2027 dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani permasalahan sosial di DIY. Dengan slogan "Melayani Mrantasi" yang bermakna memberi pelayanan paripurna, Dinas Sosial DIY berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Telaah Renstra K/L ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di bawah ini disajikan matrik telaah sasaran strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial

RI, Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

KEMENSOS	DINSOS PROVINSI	DINSOS KAB/KOTA
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial.	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS. Perwujudan dari sasaran strategis Kementerian Sosial yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial.	1) Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2026 dengan meningkatkan sasaran/ cakupan Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul 2) Meningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial dengan indikator cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial, meningkatnya penanganan bencana berbasis masyarakat dengan indikator persentase membinaan kampung siaga bencana (KSB) dan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah di wilayah Kabupaten Sleman 3) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan indikator persentase penanganan kesejahteraan sosial meningkat di wilayak Kota Yogyakarta hingga tahun 2026. 4) Mewujudkan pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran dengan meningkatkan penanganan penyadang maslah kesejahteraan sosial yang diukur dengan persentase penanganan masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun di Kabupaten Bantul. 5) Meningkatnya penanganan masalah sosial yang diukur dengan capaian penanganan masalah dari tahun ke tahun di

		Kabupaten Kulon Progo
	Pemenuhan kebutuhan dasar dan perubahan perilaku dilaksanakan dnegan menyelengaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap yang diukur dengan kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial selaras dengan sasaran strategis Dinas Sosial DIY (pada tingkat provinsi).	Meningkatkan koordinasi , pembinaan, fasilitasi serta pengembangan PSKS dan K3S dengan program pemberdayaan sosial dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan persentase tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan dan terfasilitasi.
Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, dengan indikator: 6) Indeks Partisipasi Sosial 7) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 8) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 9) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 10) Persentase (%) K/L/D yang memanfaat-kan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program pe-nanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran PSKS. Pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial serta perubahan perilaku dilaksanakan dengan peningkatan layanan publik bidang sosial untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Dinas Sosial DIY berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu dengan memfokuskan pada meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.	
Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang lain sebagai bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong stakeholders lain dalam verifikasi, validasi dan memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

	usaha kesejahteraan sosial. Pada aspek tata kelola, Dinas Sosial DIY berupaya memberikan pelayanan prima dengan pelaksanaan reformasi birokrasi serta Budaya Pemerintahan Satriya untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data kebutuhan masyarakat.	

Secara garis besar, strategi dan arah kebijakan yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota sejalan. Beberapa strategi dan kebijakan makro juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan strategi dan kebijakan bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Dari hasil telaah Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah DIY, ditemukan sasaran strategis yang saling mendukung. Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didalamnya terdapat penduduk miskin dan kelompok rentan. Kementerian Sosial mencantumkan peningkatan taraf kesejahteraan tersebut sebagai sasaran strategis pertama yang saling mendukung dengan sasaran strategis pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar.

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Sosial RI, Dinas Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menunjukkan sudah adanya sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial penduduk miskin dan rentan diterjemahkan oleh Dinas Sosial Provinsi ke dalam kebijakan yang lebih teknis. Kebijakan Dinas Sosial kabupaten/Kota telah menjangkau banyak jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan menangangi masalah kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kekerasan dan kebencanaan. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga didukung oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait dengan

penanggulangan bencana, namun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merumuskan kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga merumuskan kebijakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, meskipun Kementerian Sosial juga tidak merumuskannya ke dalam kebijakan. Kementerian Sosial RI memfokuskan kebijakan berbasis data sehingga mencantumkan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi bagian dari sasaran strategis sebagai bentuk profesionalitas pelayanan. Dinas Sosial DIY mendukungnya dengan mendorong kerjasama lintas stakeholder dalam verifikasi dan validasi serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di DIY.

Dinas Sosial Kabupaten/ Kota di wilayah DIY mencantumkan sasaran strategis dan kebijakan lebih teknis dalam penanganan masalah sosial terkait dengan PPKS secara jelas. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fokus layanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial di Kabupaten/ Kota berbasis layanan masyarakat yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek lain yang menjadi fokus intervensi di Kabupaten/ Kota adalah bidang kebencanaan khususnya di wilayah Kabupaten Sleman yang mana sebagian wilayahnya rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Hal ini selaras dengan salah satu isu yang diangkat di wilayah provinsi (Dinas Sosial DIY) yang memiliki 301 desa/ kalurahan rawan bencana (Data BPBD DIY, 2022).

Dari hasil telaah Renstra K/L dan Kabupaten/ Kota, sasaran strategis dan kebijakan masing-masing saling mendukung dan sinergis. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam usaha penanganan masalah sosial khususnya di DIY dan mendukung capaian yang ditargetkan dalam RPJMD DIY. Namun ada beberapa hal yang dapat berpotesi menjadi hambatan, terkait dengan indikator pengukuran yang belum seragam digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial di Kabupaten/ Kota. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum memfokuskan penanganan masalah sosial dari perspektif pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Akan tetapi, hal tersebut tidak menghambat secara signifikan, sebab masing-masing sasaran strategis dna kebijakan dapat saling mengisi.

Kontribusi Dinas Sosial DIY dalam memberi dukungan pada pencapaian Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Kabupaten/Kota dapat dilihat dari capaian indikator

kinerja Dinas Sosial dari tahun 2017 sampai dengan 2022 pada matrik berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial DIY

No	Sasaran	Target Renstra SKPD Tahun Ke...					Realisasi Capaian Tahun Ke ...					Rasio Capaian Pada Tahun Ke ...					Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Sasaran pada Renstra K/L
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Presentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42.38	40.97	42.17	43.08	44.28	43.74	42.17	43.85	40.91	47.27	103.21	102.93	103.98	94.96	106.75		
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasiny a dalam penyelenggar aan kesejahteraa n sosial serta	51.56	51.57	51.58	51.59	51.60	51.64	51.72	45.35	69.64	65.34	100.16	100.29	87.92	134.99	126.63		

No	Sasaran	Target Renstra SKPD Tahun Ke...					Realisasi Capaian Tahun Ke ...					Rasio Capaian Pada Tahun Ke ...					Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Sasaran pada Renstra K/L
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawana n dan kesetiakawana n sosial																	

Pada umumnya Kinerja Dinas Sosial DIY telah selaras dengan Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan telah tercapai dengan faktor pendorong antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dukungan pendanaan dari pusat untuk membantu pencapaian target penanganan PPKS. Dana luncuran diperuntukkan bagi masyarakat yang diserahkan secara langsung dari pusat (Kementerian Sosial) untuk masyarakat dan dikelola oleh pemerintah pusat.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Makin banyaknya kepedulian dunia usaha melalui CSR juga menjadi bagian dalam bentuk ini, bersama dengan banyak lembaga kesejahteraan sosial yang muncul dan dikelola oleh masyarakat yang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
3. Penanganan PPKS melalui catur pilar, yaitu melibatkan 4 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk berperan dalam penanganan PPKS. Dengan Perguruan Tinggi, misalnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengamdian, magang. Sedangkan dunia usaha melalui CSR.

Faktor penghambat pelaksanaan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbedaan periodesasi Renstra Kabupaten/Kota dengan Renstra Provinsi.
2. Perubahan kebijakan terkait Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintah bidang sosial untuk pemberdayaan sosial merupakan urusan kab/kota sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pemberdayaan.
3. Fokus pengembangan PSKS yang belum maksimal di wilayah Kabupaten/ Kota.

Analisis terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2020-2024 dan capaian sasaran Dinas Sosial DIY, menunjukkan bahwa kebijakan dan program Dinas Sosial telah sinergis dengan kebijakan dan program Kementerian Sosial. Kinerja Dinas Sosial DIY banyak didukung oleh sumber dana dari APBN melalui Kementerian Sosial. Sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar dan jaminan sosial bagi PPKS pada Program Pemberdayaan Sosial lebih banyak dibiayai dana dekonsentrasi, khususnya Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program

penanggulangan kemiskinan juga bersumber dari dana APBN. Pemerintah DIY telah menyediakan dana untuk memfasilitasi UEP PKH. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penguatan kepada RTSM peserta PKH dengan skema usaha ekonomi. pemerintah Kabupaten lainnya juga masih sebatas memberi dukungan pada kegiatan koordiansi pelaksanaan PKH. Program lain yang juga masih banyak didukung dana dari APBN adalah jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia terlantar. Pemerintah Provinsi juga belum mengalokasikan anggaran untuk menambah volume atau jumlah sasaran.

Capaian kinerja Program penanggulangan bencana juga masih lebih banyak didukung dana dari Pemerintah Pusat. Penyediaan logistik bencana, perlindungan sosial korban bencana mendapat alokasi dari dana APBN. Sedangkan APBD lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pengurangan resiko bencana. Namun semua pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan dan sasaran yang searah dalam penanggulangan bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS berdasarkan Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI		
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**		
1	**Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**		
1.1.	**Program pemantapan hutan lindung**		
	a. Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung. c. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung. d. Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.	Kecamatan Pengasih, Kokap (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Ponjong, Panggang, Playen, Karangmojo, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul)	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan hutan fungsi lindung
1.2.	**Kawasan resapan air**		
	a. Pengembangan Sarana Peresapan Air	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar resapan air Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak•-hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar wilayah resapan air

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	b. Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan resapan Air
	c. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air	Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kecamatan Turi, Pakem, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Sleman, Tempel Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kecamatan Kokap, Girimulyo, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur, Samigaluh (Kabupaten Kulonprogo) Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan (Kabupaten Bantul)	
2	**Program kawasan perlindungan setempat**		
2.1.	**Konservasi kawasan sempadan pantai**		
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Pantai Selatan DIY	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar sempadan pantai
	b. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai	Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo	Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak• hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar sempadan pantai
	c. Konservasi penyu	Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul; Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan sempadan pantai
	d. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Pantai Selatan DIY	Mengembangkan sumber penghidupan alternative bagi warga miskin di pesisir pantai Meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana
2.2	**Konservasi kawasan sempadan sungai**		
	a. Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Seluruh Wilayah DIY	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar sempadan sungai
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Wilayah DIY	Advokasi untuk regulasi penambangan pasir dan pemanfaatan sempadan sungai

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	c. Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak• hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar sempadan sungai
	d. Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan sempadan sungai
2.3	**Konservasi kawasan sekitar waduk** Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kabupaten Kulon Progo	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar Sempadan Waduk, Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak• hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar sempadan Sempadan Waduk. Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan sempadan Sempadan Waduk
2.4	**Konservasi kawasan sekitar mata air** a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	Seluruh Wilayah DIY	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar Sempadan Mata Air Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak• hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar sempadan Mata Air
	b. Pengaturan pemanfaatan mata air	Seluruh Wilayah DIY	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan Sempadan Mata Air
3	**Program perwujudan kawasan konservasi** a. Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam	Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul; Cagar Alam/Taman Wisata Alam Batu Gamping, Kabupaten Sleman; Suaka Margasatwa Sermo, Kabupaten Kulon Progo; Suaka Margasatwa Paliyan, Kabupaten Gunungkidul	Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan pelestarian alam. Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan Pengelolaan
	b. Pengembangan kawasan pelestarian alam	Taman Hutan Raya Bunder di Kecamatan Pathuk, Kecamatan Playen (Kabupaten Gunungkidul); Taman Wisata Alam Batu Gamping di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman)	Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan pelestarian alam. Melatih karang taruna di wilayah sekitar taman hutan raya utk mendukung usaha wisata alam.

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	c. Pengembangan kawasan hutan penelitian	Kecamatan Paliyan (Kabupaten Gunungkidul)	hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar cagar alam geologi dan hutan penelitian. Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan cagar alam geologi dan hutan penelitian
	d. Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan	Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Pakem (Kabupaten Sleman)	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan taman hutan raya
	e. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM	Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Pakem (Kabupaten Sleman)	
4	**Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi**		
4.1	**Kawasan cagar alam geologi**		
	a. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	a. Batu Gamping Eosin di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo, Kecamatan Prambanan,	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah cagar alam geologi dan hutan penelitian Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak•-hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar cagar alam geologi dan hutan penelitian
	b. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi	Kabupaten Sleman; d. Goa Kiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; e. Mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo; f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; g. kawasan Pantai Wediombo-Siung di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan h. Bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.	Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan cagar alam geologi dan hutan penelitian
	c. Pelestarian kawasan cagar alam geologi gumuk pasir	Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul	
	d. Pengusulan kawasan cagar alam geologi	Sesar Opak Bukit Mengger, Pematang Pantai Paleotsunami Samas, Bukit Suroloyo Menoreh, Bukit Watubelah Menoreh, Watuijo Godean, Ex-Tambang Lempung Godean, Marmer Menoreh, Aliran Lava Mangunan, Endapan Erupsi Cangkringan	

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
4.3	**Kawasan perlindungan air tanah** a. Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst b. Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah c. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah d. Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat	Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Samigaluh (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul); Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar perlindungan air tanah Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan perlindungan Air tanah Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan perlindungan air tanah
5	**Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau** a. Pengembangan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luas kawasan b. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan budidaya	a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta; b. Kawasan Perkotaan Sleman; c. Kawasan Perkotaan Bantul d. Kawasan Perkotaan Temon - Wates; dan e. Kawasan Perkotaan Wonosari a. kawasan peruntukan industri; b. kawasan peruntukan pariwisata; c. kawasan peruntukan permukiman; d. kawasan peruntukan instalasi militer; e. kawasan peruntukan instalasi kepolisian f. kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi; g. kawasan peruntukan Transit Oriented Development (TOD); h. kawasan peruntukan pesisir dan pulau- pulau kecil	Memberi prioritas pelayanan PPKS pada wilayah sekitar kawasan ruang terbuka hijau Melakukan advokasi dan fasilitasi untuk pemenuhan hak• hak ekonomi sosial dan budaya warga miskin di sekitar kawasan ruang terbuka hijau Memfasilitasi partisipasi, integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat dengan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau
6 6.1	**Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam** **Kawasan rawan bencana alam geologi** a. Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan letusan Gunung Merapi yang meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman	Mengidentifikasi desa•desa yang termasuk rawan terkena dampak letusan merapi. Mengidentifikasi kelompok rentan untuk mempersiapkan perlindungan khusus.

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	b. Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana		Membangun Kampung Siaga bencana Melakukan simulasi Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS lainnya di wilayah
6.2	**Kawasan Rawan Bencana Longsor** a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor b. Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor	a. Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; b. Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semin, Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul; c. Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman; dan d. Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Temon di kabupaten Kulon Progo.	Melakukan pemetaan desa• desa rawan longsor Mengidentifikasi kelompok rentan untuk mempersiapkan perlindungan khusus. Membangun Kampung Siaga bencana Melakukan simulasi Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS lainnya di wilayah Tersebut
6.3	**Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan** a. Penyediaan prasarana mitigasi bencana b. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air c. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang d. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami	a. Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo; b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; dan c. Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Panggang, dan Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul	
6.4	**Kawasan Rawan Banjir** a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana banjir b. Pengembangan prasarana resapan air hujan	a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; b. Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates di Kabupaten Kulon	Melakukan pemetaan desa• desa rawan banjir Mengidentifikasi kelompok rentan untuk mempersiapkan perlindungan khusus.

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	c. Pengembangan sistem drainase	Progo; c. Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman; d. Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan di Kabupaten Bantul; dan e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul.	Membangun Kampung Siaga Bencana Melakukan simulasi Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS lainnya di wilayah Tersebut
	d. Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir e. Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertalud	Sungai di kawasan rawan bencana banjir	
6.5	**Kawasan Rawan Gempa Bumi**		
	a. Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	a. Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul; b. Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan a. Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.	Melakukan pemetaan desa• desa rawan gempa bumi. Mengidentifikasi kelompok rentan untuk mempersiapkan perlindungan khusus.
	b. Pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa	Seluruh DIY	Membangun Kampung Siaga bencana
	c. Penyediiaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi		Melakukan simulasi
	d. Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah		Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS lainnya di wilayah Tersebut

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
6.6	**Kawasan Rawan Kekeringan** a. Penyediaan infrastruktur air bersih b. Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan c. Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian	a. Kecamatan Prambanan di Kabupaten Sleman b. Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo; c. Kecamatan Pajangan, Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul; dan d. Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul.	Melakukan pemetaan desa• desa rawan kekeringan Mengidentifikasi kelompok rentan untuk mempersiapkan perlindungan khusus Membangun Kampung Siaga bencana Melakukan simulasi Memberdayakan Keluarga Fakir Miskin dan PPKS lainnya di wilayah tersebut.
7 7.1.	**Kawasan Cagar Budaya** **Melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan**	a. Kawasan Cagar Budaya Prambanan yang terdiri dari: - Kawasan Candi Prambanan - Ratu Boko; - Kawasan Candi Kalasan; dan - Kawasan Candi Kedulan; b. Kawasan Cagar Budaya Kraton; c. Kawasan Cagar Budaya Pakualaman; d. Kawasan Cagar Budaya Kotagede; e. Kawasan Cagar Budaya Kota Baru; f. Kawasan Cagar Budaya Imogiri; g. Kawasan Cagar Budaya Kerto – Pleret; dan h. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang pariwisata. Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan wirausaha bidang pariwisata budaya Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra pariwisata Melakukan kampanye dan edukasi pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA
B 1	**Perwujudan Kawasan Budidaya** **Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi** a. Pelestarian kawasan hutan produksi b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul), Kecamatan Temon, Kokap (Kabupaten Kulon Progo), Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Karangmojo.	Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah tersebut dengan memanfaatkan budidaya hutan produksi

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
		Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Ngawen, dan Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)	Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan ketrampilan bidang olahan hasil hutan Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan kampanye kelestarian lingkungan.melalu i Karang Taruna, PSM dan WKSBM
2	**Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat** a. Pelestarian kawasan hutan rakyat b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat	Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi (Kabupaten Sleman); Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang (Kabupaten Kulon Progo); dan Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul).	Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah tersebut dengan memanfaatkan budidaya hutan produksi Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan ketrampilan bidang olahan hasil hutan Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan kampanye kelestarian lingkungan.melalu i Karang Taruna, PSM dan WKSBM
3	**Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian** a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi c. Penetapan LP2B d. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B e. Intensifikasi pertanian f. Pembangunan pusat perbenihan (Jogja Agro Tekno Park) g. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi h. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Seluruh DIY Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir,	Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah tersebut dengan memanfaatkan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi pada perdagangan hasil pertanian, perikanan dan peternakan Memberdayakan Karang Taruna dengan memfasilitasi usaha perikanan dan peternakan Membuka akses permodalan petani pada LKM KUBE Memprioritaskan RTSM di kawasan tersebut sebagai calon peserta PKH Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	i. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah. j. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.	Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman (Kabupaten Sleman); Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan (Kabupaten Bantul); Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul); Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates (Kabupaten Kulon Progo).	lainnya di wilayah tersebut dengan mengintegrasikan budidaya pertanian, dan peternakan lahan kering
	k. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agro – ekowisata.	Kawasan Patuk dan sekitarnya Kawasan Pegunungan Menoreh dan sekitarnya	
	l. Pengembangan peternakan sapi potong.	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	
	m. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul	
	n. Pengembangan peternakan sapi perah	Kabupaten Sleman	
	o. Pengembangan peternakan unggas	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	
4,	**Program Perwujudan Kawasan Perikanan**		
	a. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	Memberdayakan keluarga fakir miskin di wilayah tersebut dengan memanfaatkan budidaya perikanan
	b. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng	Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul	Memberdayakan perempuan rawan sosial ekonomi
	c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	Memberdayakan Karang Taruna dengan pelatihan ketrampilan bidang olahan kawasan perikanan
	d. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan (Kabupaten Kulon Progo); Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak (Kabupaten Sleman); Kecamatan Pandak (Kabupaten Bantul); Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong (Kabupaten Gunungkidul)	Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan budidaya kawasan perikanan melalui Karang Taruna, PSM dan WKSBM
	e. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten	

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	f. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya g. revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebihan h. Penataan kawasan budidaya tambak	Wilayah Pesisir DIY Wilayah Pesisir DIY Kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	
5,	**Program Perwujudan Kawasan Pertambangan** a. Pemetaan kawasan peruntukan pertambangan secara rinci b. Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang c. Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan d. Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung e. Pengembangan Industri pengolahan hasil tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah bahan galian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	Melakukan advokasi untuk afirmasi tenaga kerja lokal dari keluarga fakir miskin dalam usaha sektor pertambangan Melaksanakan pelatihan ketrampilan olahan tambang pasir di kecamatan Cangkringan Melakukan pendampingan sosial untuk mencegah dan menangani konflik sosial sebagai dampak dari pertambangan Memfasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi untuk penunjang kegiatan pertambangan (warung makan) Mencegah anak• anak terpaksa bekerja atau dipekerjakan dalam sektor pertambangan
6,	**Program Perwujudan Kawasan Industri** a. penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan industry	a. Kawasan Industri Sentolo b. Kawasan Industri Piyungan	Melakukan advokasi untuk afirmasi tenaga kerja lokal dari keluarga fakir miskin dalam usaha sektor industri

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	b. Penetapan persyaratan kawasan industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang aman	c. Kawasan Industri Sedayu-Pajangan d. KPI di Kecamatan Piyungan e. KPI di Kecamatan Sedayu f. KPI di Kecamatan Pajangan g. KPI di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah h. KPI di Kecamatan Nanggulan i. KPI Candirejo di Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen j. KPI Mijahan di Kecamatan Semanu	Memberi pelatihan ketrampilan dan magang bagi Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan sektor industri Memfasilitasi usaha ekonomi keluarga fakir miskin untuk penunjang kegiatan industri Mengintegrasikan pengembangan KUBE dengan usaha UKM
	c. Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM	Sentra IKM di seluruh DIY	
	d. Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	Sentra IKM di seluruh DIY	
	e. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Sentra IKM di seluruh DIY	
7,	**Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata**		
	a. Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang pariwisata. Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan wirausaha bidang pariwisata budaya Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra pariwisata Melakukan kampanye dan edukasi pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS lainnya di wilayah tersebut dengan usaha di bidang pariwisata Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan wirausaha bidang pariwisata Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi untuk menunjang sektor pariwisata Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan praktek komodifikasi seksual untuk menjaga citra pariwisata
	b. Pengembangan destinasi wisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	c. Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	d. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	f. Konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	g. Revitalisasi kawasan pariwisata yang telah menurun kualitasnya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY	
	h. Pengembangan desa wisata dan desa budaya	Desa yang potensial dikembangkan sebagai desa wisata dan desa budaya	
	i. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya	Kawasan Lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya	
	j. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya	Kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya	
	k. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Godean	Kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya	
	l. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya	Kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya	
	m. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya	Kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya	
	n. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya	Kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya	

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	o. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo	Kawasan Pleret-Imogiri-Mangunan-Dlingo	
	p. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Pantai Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	Kawasan Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	
	q. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas di Kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis	Kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis	
	r. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan sekitarnya	Kawasan Pantai Ngobaran-Ngrenehan-Watu Gupit dan sekitarnya	
	s. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Pantai Baron-Sundak dan sekitarnya	Sub Kawasan kluster Pantai Baron-Kukup, Sub Kawasan kluster Pantai Sepanjang-Ngrumput, Sub Kawasan kluster Pantai Krakal-Pok Tunggal	
	t. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan Pantai Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba, dan sekitarnya	Sub kawasan kluster Pantai Jogan-Dadapan- Siung, Sub kawasan Bengawan Solo Purba- Pantai Sadeng dan sekitarnya, Sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang, penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Kabupaten Wonogiri	
	u. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Sadeng dan sekitarnya	Kawasan Sadeng dan sekitarnya	
	v. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Patuk, Nglanggeran dan sekitarnya.	Sub Kawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya, Sub Kawasan Patuk, dan Sub Kawasan Gedangsari.	
	w. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas di Kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya.	Sub Kawasan Kalisuci, Sub Kawasan Sri Gethuk, Sub Kawasan Lembah Mulo, Sub Kawasan Hutan Wisata Turunan, dan Sub Kawasan Hutan Wisata Wanagama	
	x. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Menoreh.	Sub Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo, Kawasan Sermo-Kalibiru, Sub Kawasan Nglinggo-Tritis, Sub Kawasan Kiskendo-Kelir, Sub Sub Kawasan Sentolo- Pengasih, Sub Kawasan Nanggulan, Penanda Keistimewaan di pintu masuk arah Purworejo dan Bandar Udara International Yogyakarta Ariport	
8	**Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman**		
8.1	**Program Pengurangan Kawasan Kumuh**		
	a. Pencegahan kawasan kumuh b. Penanganan kawasan kumuh c. Perbaikan rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	Melakukan advokasi dan fasilitasi rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) Melakukan edukasi masyarakat dan fasilitasi tentang aksesibilitas di wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia Melakukan edukasi masyarakat tentang

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
8.2	**Program Pengembangan Perumahan**		
8.2.1	**Permukiman Perkotaan**		
	a. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	Melakukan advokasi dan fasilitasi rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH)
	b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		Memfasilitasi rumah susun sewa (rusunawa) bagi warga miskin kota yang tidak mempunyai rumah
	c. Pengembangan unit rumah susun		Melakukan edukasi masyarakat dan fasilitasi tentang aksesibilitas di wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia Melakukan edukasi masyarakat tentang
	d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman		
	e. Pendataan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	f. Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk)		
8.3	**Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah**		
9	**Program Perwujudan Kawasan Hankam**		
9.1	**Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan**		
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi militer		
9.2	**Kawasan peruntukan instalasi kepolisian**		
	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi kepolisian	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta	
10	**Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya**		
10.1	**Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi**		Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan kawasan riset dan pendidikan tinggi
	a. Pengembangan kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	
	b. Peningkatan Kawasan Riset Parangtritis Geomaritime Science park dan Baron Teknopark	Kabupaten Bantul (Parangtritis Geomaritime Science park) dan Kabupaten Gunungkidul (Baron Teknopark)	
	c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul	
	d. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Yogyakarta	
	e. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul	
10.2	**Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil**		
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	Memberdayakan keluarga fakir miskin dan PPKS lainnya di wilayah tersebut dengan pengelolaan usaha

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	b. Pelindungan dan pengembangan pulau-pulau kecil	Pulau Timang, Pulau Kalong, Pulau Drini, Pulau Jumpino, Pulau Watunganten, Pulau Gunungsemar, Pulau Payung, Pulau Ngrawe, Pulau Lawang, Pulau Watupayungsiratan, Pulau Watulawang, Pulau Ngondo, Pulau Watupatungsiung, Pulau Watupanjang, Pulau Watuglambor, Pulau Watubebek, Pulau Watutogog, Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Amben, Pulau Watugrek, Pulau Gununggandul, Pulau Godeg, Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kabupaten Gunungkidul)	potensi laut Memberdayakan Karang taruna dengan pelatihan wirausaha pengelolaan potensi laut Fasilitasi usaha ekonomi perempuan rawan sosial ekonomi untuk memanfaatkan potensi laut Melakukan antisipasi dan pencegahan tindakan yang membahayakan kawasan pesisir
	c. Peningkatan akeseibilas menuju kawasan pesisir d. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	
10.3	**Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi**		
	a. Studi pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY	
	b. Penyusunan peraturan gubernur tentang pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY	
PERWU	**JUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI**		
1	**Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya**		
1.1.	**Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya yang**		Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan kawasan strategis provinsi
	a. Penyusunan kajian RTR KSP Sosial Budaya yang	Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi. Kawasan Puro Pakualaman, Kawasan Perbukitan Menoreh, Kawasan Samas-Parangtritis, Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo	
	b. Penetapan RTR KSP Sosial budaya yang diprioritaskan		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Sosial budaya yang diprioritaskan		
1.2	**Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya**		
	a. Penetapan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Keputusan Gubernur	Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya di seluruh DIY	
	b. Penyusunan kajian RTR kawasan sudut kepentingan sosial dan budaya DIY		
	c. Penetapan RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Peraturan Daerah		
	d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya		
2	**Kawasan strategis kepentingan ekonomi**		
2.1	**Kawasan Perkotaan Yogyakarta**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman)	
	b. Penetapan RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan Peraturan Daerah		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta		
2.2	**Kawasan Temon-Prambanan**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Temon-Prambanan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman	
	b. Penetapan RTR Kawasan Temon-Prambanan dengan		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan		

No.	Nama Program	Lokasi	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
	Prambanan		
	d. Pembangunan kawasan aerotropolis di sekitar bandara baru Yogyakarta	Kecamatan Temon dan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo	
2.3	**Kawasan Tempel-Parangtritis**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Tempel-Parangtritis	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul	
	b. Penetapan RTR Kawasan Tempel-Parangtritis dengan		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Tempel- Parangtritis		
2.4	**Kawasan Pantai Selatan DIY**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan DIY	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul	
	b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan DIY dengan		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan DIY		
3	**Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung**		
3.1	**Kawasan Bentang Alam Karst**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Bentang Alam Karst	a. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul; dan b. Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul c. Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, di Kabupaten Kulon Progo	
	d. Penetapan RTR Kawasan Bentang Alam Karst dengan		
	e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bentang Alam Karst		
3.2	**Kawasan Gumuk Pasir**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Gumuk Pasir	Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul	
	b. Penetapan RTR Kawasan Gumuk Pasir dengan Peraturan		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Gumuk Pasir		
4	**Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi**		
	a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul	
	b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan Peraturan Daerah		
	c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru		

Dari hasil telaah RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dikaitkan dengan layanan Dinas Sosial DIY terdapat berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Pengembangan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis DIY memberikan dampak sosial positif terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah pengembangan pertanian, industri, pariwisata yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan UEP dan KUBE serta usaha ekonomi produktif lain berbasis kesejateraan sosial. Pengembangan kawasan rawan bencana sinergis dengan arah kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana (KSB). Akan tetapi, perlu adanya antisipasi melalui sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait dampak sosial dari pengembangan kawasan pemukinan, dan dampak negatif industralisasi dan pariwisata yang berpotensi menimbulkan masalah sosial baru antara lain kemiskinan baru, gelandangan, pengemis karena arus urbanisasi yang tidak tertangani dengan baik yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target pelayanan Dinas Sosial.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Berdasarkan telaah tersebut diatas dan analisis lingkungan strategis ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial DIY yaitu :

1. Kemiskinan

   Kemiskinan saling terkait dengan munculnya permasalahan sosial lainnya baik sebagai penyebab maupun sebagai dampak. Kemiskian merupakah isu krusial yang harus ditangani dengan berbagai program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarkat. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai isu utama, intervensi permasalahan kesejahteraan social diharapkan dapat menimbulkan efek

domino dalam mengatasi permasalahan social lainnya.

2. **Anak Terlantar**

Anak sebagai generasi penerus pembangunan di masa depan membutuhkan perlindungan dari berbagai masalah social yang dapat menimpa mereka. Isu ketelantaran anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di DIY dan memerlukan penanganan. Peningkatan kriminalitas terkait anak baik sebagai korban bahkan menjadi pelaku tindak kriminal menuntut kehadiran pemerintah salah satunya melalui Dinas Sosial. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan anak menjadi salah satu prioritas Dinas Sosial DIY untuk wujudkan.

3. **Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan**

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terlaksana secara ideal. Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi langsung pelayanan kesejahteraan sosial. Terlebih di masa pandemic covid-19, penyandang disabilitas perlu mendapatkan prioritas untuk memperoleh perlindungan dan jaminan social dari pemerintah agar memiliki akses yang sama sebagai warga masyarakat.

4. **Kebencanaan**

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Laut Jawa, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogya dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial. Dibutuhkan langka penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana yang sistematis sebagai bentuk perlindungan pemerintah DIY melalui Dinas Sosial untuk warga masyarakat.

5. **Lanjut Usia Terlantar**

Usia harapan hidup yang tinggi di DIY menuntut pemerintah untuk siap memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga lanjut usia denagn berbagai program. Selama ini program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia. Kehadiran Dinas Sosial diperlukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi lanjut usia dan melaksanakan regualasi tentang perlindungan lanjut usia di DIY.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tujuan dan sasaran Dinas Sosial juga tidak terlepas dari apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam visi misi tersebut.

Adapun visi pembangunan jangka menengah atau RPJMD DIY yang ingin diwujudkan adalah **"Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalu Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".**

Lima Kemuliaan atau Panca Mulia, yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik dalam lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang

baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur DIY, khususmya dalam mencapai kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Dalam kurun lima tahun kedepan Dinas Sosial merumuskan tujuan yang akan dicapai pada akhir periode Renstra 2022-2027, sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Oleh karena itu, sasaran harus mempunyai indikator yang terukur. Penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus, sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial DIY terjabarkan menjadi empat hal, yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat
3. Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)
4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Berpijak dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial DIY

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial			n/a	27.88%	28.10%	28.32%	28.44%	28.44%	28.44%
			Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	21.00%	21.22%	21.51%	28.32%	21.57%	21.57%
			Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	N/A	26.05%	26.20%	26.26%	26.43%	26.43%	26.43%
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
			Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	NA	60.70%	61.03%	61.03%	61.36%	61.36%	61.36%

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"			
MISI : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.1 Penguatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1.1. Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan
			1.1.2 Membangun sinergi lintas mitra yang terkait dalam pemenuhan hakhak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		1.2 Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia	1.2.1 Promosi perlindungan dan pemenuhan hakhak bagi lansia

		1.3 Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.1 Promosi kesejahteraan sosial melalui media penyuluhan dan membuka akses bagi warga miskin
		1.4 Optimalisasi peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	1.4.1 Peningkatan kapasitas PSKS
	2. Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawan an sosial kepada masyarakat	2.1 Optimalisasi peran PSKS dalam penanaman nilai-nilai	2.1.1 peningkatan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial
	3. Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)	3.1 Optimalisasi mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana	3.1.1 Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat (pembentukan KSB, sarasehan keserasian sosial) dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial (tagana, tenaga pelopor perdamaian, tim kampung siaga

	4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	4.1 Pelayanan Prima Keterbukaan Informasi Publik	4.1.1 Optimalisasi Budaya Satriya 4.1.2 Peningkatan Asesibilitas Data Kesejahteraan Sosial 4.1.3 Meningkatkan akuntabilitas, trasparansi dan pencapaian kinerja pelayanan

Dalam rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial DIY untuk penentuan sasaran sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pada Dinas Sosial DIY mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2021. Pendanaan Program Kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni selain itu juga melaksanakan Dana Keistimewaan. Sehubungan dengan urusan Kebencanaan maka Dinas Sosial DIY juga mengakses Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka respon cepat atas kejadian bencana yang perlu segera ditindalkanjuti.

"Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Pada halaman selanjutnya"

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu menyajikan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial**	**n/a**	**n/a**		**17.80%**		**18.33%**		**18.32%**		**18.44%**		**18.44%**		**18.44%**		**Dinas Sosial**	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			**Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**N/A**	**N/A**		**11.00%**		**21.22%**		**21.11%**		**18.32%**		**21.57%**		**21.57%**		**Dinas Sosial**	
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberian rekomendasi /ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang**	**N/A**	**N/A**	**2.632.059.000**	**18.95%**	**4.307.468.300**	**21.41%**	**5.115.571.700**	**22.82%**	**8.151.534.855**	**22.02%**	**8.966.688.041**	**22.62%**	**8.966.688.041**	**22.02%**	**38.180.099.937**	**Dinas Sosial**	
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1913 orang	1913 orang	2.632.059.000	1913 orang	4.307.468.300	1943 orang	5.115.571.700	1943 orang	8.151.534.855	1943 orang	8.966.688.041	1943 orang	8.966.688.041	1943 orang	38.180.099.937	Dinas Sosial	
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Memdapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	n/a	n/a	0	1676 orang	2.436.013.400	1880 orang	2.395.779.000	1880 orang	1.143.087.830	1880 orang	1.698.386.613	1880 orang	1.698.386.613		9.709.494.336	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	78 orang	78 orang	1.438.740.000	78 orang	1.653.985.500	78 orang	1.787.223.500	78 orang	2.051.985.800	78 orang	2.218.281.000	78 orang	2.218.281.000		10.889.494.400	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	17 lembaga	17 lembaga	1.179.319.000	16 lembaga	816.329.800	16 lembaga	978.367.900	16 lembaga	8.164.344.855	16 lembaga	5.010.035.428	16 lembaga	5.010.035.428		17.541.021.383	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Mantan Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial**	**160 orang**	**160 orang**	**30.487.976.800**	**22.83%**	**24.279.864.620**	**22.50%**	**29.829.121.400**	**22.50%**	**44.144.676.056**	**22.70%**	**48.691.863.027**	**22.70%**	**48.681.125.204**	**22.70%**	**226.029.127.497**	**Dinas Sosial**	
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	185 orang	185 orang	6.673.951.900	185 orang	8.008.058.300	185 orang	8.683.800.100	185 orang	13.280.029.910	185 orang	14.608.032.950	185 orang	14.608.032.950	185 orang	68.037.906.210	Dinas Sosial	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBG)	275 orang	275 orang		275 orang		275 orang		275 orang		275 orang		275 orang		275 orang			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasantaran Sili	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
		1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Eis Minimal Kewenangan Provinsi	n/a orang	n/a orang	4.627.581.500	160 orang	4.233.405.500	160 orang	4.507.489.400	160 orang	3.240.413.860	160 orang	6.864.454.146	160 orang	6.864.454.146		33.337.793.552	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang	160 Orang	1.386.800.000	160 Orang	1.637.130.500	160 Orang	1.102.857.300	160 Orang	1.617.460.724	160 Orang	1.779.206.796	160 Orang	1.779.206.796		8.622.331.116	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.03	Penyediaan Akomodasi yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersedia Akomodasi Layak Huni Kewenangan Provinsi	460 Orang	460 Orang	331.958.800	460 Orang	348.204.500	460 Orang	388.476.600	460 Orang	161.629.500	460 Orang	617.793.000	460 Orang	617.793.000		2.651.842.600	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengganti Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	7.523.000	20 Orang	7.482.000	20 Orang	54.154.000	20 Orang	17.196.500	20 Orang	18.907.500	20 Orang	18.907.500		124.161.900	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perlindungan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 Orang	160 Orang	577.310.000	160 Orang	618.882.100	160 Orang	619.012.800	160 Orang	398.849.813	160 Orang	1.098.734.244	160 Orang	1.098.734.244		4.981.522.701	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Penerapan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2021)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.06.04.1.01.06	Pembelian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	640 Orang	640 Orang	1.388.684.000	640 Orang	1.888.492.200	640 Orang	1.608.327.680	640 Orang	2.026.553.345	640 Orang	5.539.208.600	640 Orang	3.189.339.680		12.962.441.705	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.07	Pembelian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari Kewenangan Provinsi	460 orang	460 orang	159.168.900	460 orang	181.141.120	460 orang	229.024.480	460 orang	340.313.500	460 orang	814.341.000	460 orang	814.341.000		2.536.330.900	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	8 orang	8 orang	3.600.000	8 orang	2.100.000	8 orang	2.100.000	8 orang	3.920.400	8 orang	4.312.440	8 orang	4.312.440		20.345.280	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	165 orang	165 orang	198.969.100	165 orang	306.492.004	165 orang	113.297.680	165 orang	159.138.800	165 orang	175.052.800	165 orang	175.052.800		889.981.100	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.10	Pembelian Penyaran Pendayagunan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendayagunan Keluarga Kewenangan Provinsi	18 orang	18 orang	17.324.000	18 orang	8.400.004	18 orang	8.400.000	18 orang	21.388.444	18 orang	23.527.288	18 orang	23.527.288		182.587.020	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.11	Pembelian Penyaran Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	28 orang	28 orang	21.300.000	28 orang	3.900.004	28 orang	8.914.000	28 orang	5.117.600	28 orang	6.069.360	28 orang	6.069.360		32.970.320	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	72.444.400	1 dokumen	88.366.280	1 dokumen	87.657.724	1 dokumen	96.423.496	1 dokumen	96.423.496		441.295.316	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	125 anak	125 anak	4.647.323.000	125 anak	3.519.862.004	125 anak	4.093.084.280	125 anak	6.535.662.291	125 anak	7.177.162.425	125 anak	7.211.596.340	125 anak	32.895.422.960	Dinas Sosial DIY	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	340 anak	340 anak		340 anak		340 anak		340 anak		340 anak		340 anak		340 anak			
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	125 orang	125 orang	48.300.000	125 orang	9.030.004	125 orang	45.000.000	125 orang	129.304.680	125 orang	252.235.148	125 orang	277.418.603		861.328.431	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemrakarsa sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	468 orang	468 orang	1.745.309.500	468 orang	1.218.032.104	468 orang	1.819.449.840	468 orang	2.133.981.410	468 orang	2.347.379.551	468 orang	2.347.379.551		11.252.531.912	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	468 orang	468 orang	686.895.500	468 orang	346.494.004	468 orang	468.734.080	468 orang	602.077.841	468 orang	761.284.750	468 orang	761.284.750		3.736.611.345	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Akomodasi yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersedia Akomodasi Layak Huni Kewenangan Provinsi	125 orang	125 orang	0	125 orang	204.072.004	125 orang	312.489.680	125 orang	520.000.000	125 orang	640.000.000	125 orang	650.000.000		1.526.482.700	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Pemenuhan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	468 orang	468 orang	431.111.000	468 orang	172.123.200	468 orang	355.591.780	468 orang	351.975.510	468 orang	343.173.061	468 orang	343.173.061		1.765.553.102	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.06	Pembelian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	463 orang	463 orang	789.621.000	463 orang	265.942.900	463 orang	612.517.680	463 orang	1.412.762.000	463 orang	1.554.038.500	463 orang	1.566.698.500		6.188.921.600	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.07	Pembelian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari Kewenangan Provinsi	120 orang	120 orang	32.739.000	120 orang	85.520.300	120 orang	79.520.400	120 orang	100.057.560	120 orang	111.053.316	120 orang	111.053.316		474.840.892	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	11 orang	11 orang	2.200.000	5 orang	2.000.004	5 orang	3.000.000	5 orang	3.630.000	5 orang	3.993.000	5 orang	3.993.000		17.616.000	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	600 orang	600 orang	776.021.000	456 orang	696.771.304	456 orang	718.668.080	456 orang	973.881.810	456 orang	1.071.269.991	456 orang	1.071.269.991		5.381.822.193	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.10	Pembelian Penyaran Pendayagunan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pendayagunan Keluarga Kewenangan Provinsi	27 orang	27 orang	9.800.000	428 orang	6.000.004	428 orang	6.000.000	428 orang	63.336.300	428 orang	70.396.500	428 orang	70.396.500		215.580.000	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.11	Pembelian Penyaran Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	27 orang	27 orang	119.121.000	158 orang	84.714.004	158 orang	65.164.800	158 orang	155.331.030	158 orang	170.611.574	158 orang	170.611.574		784.786.776	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 orang	2 orang	6.600.000	2 orang	2.000.004	2 orang	2.000.000	2 orang	3.114.900	2 orang	4.525.400	2 orang	4.525.400		15.784.800	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-	0	1 dokumen	99.130.900	1 dokumen	139.039.180	1 dokumen	133.819.950	1 dokumen	147.201.945	1 dokumen	147.201.945		697.423.840	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)	228 orang	228 orang	6.574.870.750	228 orang	4.954.505.504	228 orang	6.878.015.080	228 orang	10.170.473.994	228 orang	11.198.021.993	228 orang	11.180.663.743	228 orang	50.945.150.180	Dinas Sosial DIY	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	2575 orang	2575 orang		2575 orang		2775 orang		3045 orang		3345 orang		3345 orang		3345 orang			
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	2028 orang	2028 orang	4.042.868.000	1678 orang	5.235.555.604	2968 orang	4.968.800.080	3125 orang	5.751.313.740	3428 orang	6.282.445.114	3428 orang	6.282.441.114		38.543.457.668	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	328 orang	328 orang	570.020.000	328 orang	395.566.004	328 orang	468.000.080	328 orang	716.557.800	328 orang	788.191.580	328 orang	788.191.580		3.746.507.760	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Akomodasi yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersedia Akomodasi Layak Huni Kewenangan Provinsi	328 orang	328 orang	180.273.000	188 orang	16.746.004	303 orang	20.000.000	303 orang	169.311.870	303 orang	186.242.837	303 orang	186.242.837		678.011.144	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	25 orang	25 orang	0	25 orang	0	35 orang	60.000.000	45 orang	65.000.000	50 orang	70.000.000	50 orang	75.000.000		270.000.000	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Pemenuhan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	228 orang	228 orang	185.489.800	228 orang	215.705.604	228 orang	270.000.080	228 orang	567.702.960	228 orang	624.473.256	228 orang	624.473.256		2.531.834.672	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.06	Pembelian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	228 orang	228 orang	1.079.282.000	228 orang	675.940.104	228 orang	699.900.080	228 orang	1.948.555.800	228 orang	2.142.816.880	228 orang	2.142.816.880		8.688.271.680	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.03.07	Pembelian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehat/1 Hari Kewenangan Provinsi	228 orang	228 orang	476.813.750	228 orang	232.157.004	228 orang	233.015.080	228 orang	695.677.400	228 orang	765.245.140	228 orang	765.245.140		3.188.753.430	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.06.04.1.05.10	Pemberian Pelayanan Pemutusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemutusan Keluarga Kewenangan Provinsi	216 orang	216 orang	21.600.000	216 orang	14.400.000	216 orang	14.400.000	216 orang	26.136.000	216 orang	26.749.600	216 orang	28.749.600		134.035.200	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	144 orang	144 orang	4.320.000	2 orang	4.320.000	2 orang	4.320.000	2 orang	3.877.680	2 orang	8.225.580	2 orang	9.225.580		36.890.960	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.12	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	94.220.000	40 orang	180.880.000	40 orang	130.880.000	40 orang	175.543.000	40 orang	193.207.960	40 orang	193.207.960		856.439.520	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	-	-	0	13 dokumen	0	13 dokumen	0	13 dokumen	87.957.724	13 dokumen	96.423.496	13 dokumen	108.863.846		290.347.066	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBG)	50 orang	50 orang	1.132.035.400	50 orang	982.761.300	50 orang	987.831.300	50 orang	1.409.983.630	50 orang	1.638.651.999	50 orang	1.648.209.199	50 orang	7.671.214.830	Dinas Sosial	
		1.06.04.1.04.01	Pemenuhan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	499.500.000	50 orang	488.680.000	50 orang	429.888.000	50 orang	604.915.000	50 orang	663.486.830	50 orang	665.906.830		3.254.218.860	BRSBG1 Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.02	Pemenuhan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	188.170.000	50 orang	99.812.100	50 orang	121.848.500	50 orang	167.427.700	50 orang	184.170.470	50 orang	184.170.470		865.218.840	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.03	Pemenuhan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersediakan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	36.165.000	50 orang	32.910.200	50 orang	32.910.200	50 orang	48.108.996	50 orang	52.919.896	50 orang	52.919.896		256.012.186	BRSBG1 Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.04	Pemenuhan Pemberian Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Pemberian Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	10.874.000	50 orang	14.657.800	50 orang	14.657.800	50 orang	14.510.000	50 orang	15.972.000	50 orang	17.569.200		87.010.800	BRSBG1 Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	168.182.000	50 orang	124.233.500	50 orang	124.233.500	50 orang	205.623.423	50 orang	226.485.762	50 orang	226.485.762		1.005.483.947	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	23.493.000	50 orang	21.200.800	50 orang	4.820.800	50 orang	36.300.000	50 orang	39.930.000	50 orang	39.930.000		169.673.800	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	286.881.400	50 orang	240.448.700	50 orang	240.448.700	50 orang	816.113.219	50 orang	890.624.142	50 orang	890.624.142		3.884.045.104	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	2.420.000	10 orang	2.662.000	10 orang	2.662.000		10.744.000	Dinas Sosial	BRSBG1 Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.04.09	Akses Kemudahan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	7.400.000	50 orang	14.400.000	50 orang	14.400.000	50 orang	11.858.000	50 orang	13.043.800	50 orang	13.043.800		74.345.800	Dinas Sosial DIY	BRSBG1 Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	10.020.000	8 orang	4.800.000	8 orang	4.800.000	8 orang	22.506.000	8 orang	24.756.600	8 orang	24.756.600		81.619.200	Dinas Sosial DIY	BRSBG1 Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	0	4 dokumen	17.100.000	4 dokumen	19.600.000	4 dokumen	20.691.000	4 dokumen	22.760.100	4 dokumen	22.760.100		103.111.200	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPPSW)	70 orang	70 orang	9.259.795.210	70 orang	7.317.875.420	70 orang	9.329.588.800	70 orang	12.869.286.222	70 orang	13.891.590.660	70 orang	14.823.893.052	70 orang	66.968.431.404	Dinas Sosial	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPPSW)	80 orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	157 orang	157 orang		157 orang		157 orang		157 orang		157 orang		157 orang		157 orang			
		1.06.04.1.05.01	Pemenuhan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	327 orang	327 orang	3.432.260.000	327 orang	2.777.875.300	327 orang	3.177.626.500	327 orang	4.108.299.370	327 orang	4.687.129.407	327 orang	4.607.113.407		22.789.496.984	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.02	Pemenuhan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	327 orang	327 orang	817.915.000	327 orang	681.401.600	327 orang	966.016.900	327 orang	938.251.900	327 orang	1.032.077.099	327 orang	1.032.077.099		5.468.239.638	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.03	Pemenuhan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersediakan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	265 orang	265 orang	859.557.000	247 orang	640.090.600	247 orang	535.694.300	227 orang	648.000.000	227 orang	550.000.000	227 orang	560.000.000		2.934.101.500	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.04	Pemenuhan Pemberian Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemberian Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	327	327	751.183.750	327	571.179.800	327	537.767.200	327	867.433.733	307	1.064.177.091	307	1.064.177.092		4.955.998.814	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	345 orang	345 orang	1.761.485.500	327 orang	1.316.132.920	327 orang	2.098.306.700	307 orang	1.949.412.373	307 orang	2.914.353.607	307 orang	2.914.353.607		11.004.564.704	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	345 orang	345 orang	736.174.000	327 orang	336.871.800	327 orang	353.145.300	307 orang	1.076.405.836	307 orang	1.184.046.420	307 orang	1.302.451.062		5.028.494.218	Dinas Sosial DIY	
		1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	140 orang	140 orang	1.063.889.000	150 orang	993.619.800	150 orang	1.209.234.400	150 orang	1.348.255.336	150 orang	1.500.821.470	150 orang	1.518.821.470		8.610.386.476	Dinas Sosial DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Memfasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	-	-	0	70 orang	1.200.000	70 orang	1.200.000	70 orang	1.904.000	70 orang	1.394.400	70 orang	1.194.400		11.892.800	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	250 orang	250 orang	7.560.000	230 orang	13.800.000	230 orang	75.720.000	230 orang	91.791.520	250 orang	34.957.500	230 orang	18.431.250		281.400.282	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	115 orang	115 orang	339.665.000	247 orang	221.314.800	247 orang	221.314.800	247 orang	488.401.210	217 orang	481.241.261	217 orang	492.241.261		2.187.579.280	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pemeliharaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	8	8	0	76	83.772.400	76	83.772.400	76	90.024.800	76	99.026.400		99.026.400		492.621.400	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial**	**6113 Orang**	**6113 Orang**	**7.633.436.000**	**3.53%**	**1.718.808.200**	**3.55%**	**3.370.652.300**	**3.67%**	**20.072.843.800**	**3.68%**	**21.959.969.074**	**3.68%**	**21.919.969.074**	**3.68%**	**78.933.197.488**	**Dinas Sosial**	
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terfasilitasinya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat	31	31	643.595.800	30	151.437.800	30	142.897.800	31	885.776.800	31	977.654.800	31	977.654.800	31	3.783.567.800	Dinas Sosial	
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	30 orang	30 orang	618.145.800	29 orang	137.837.800	29 orang	130.325.000	30 orang	858.013.800	30 orang	943.815.000	30 orang	943.815.000		3.631.941.800	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1 orang	1 orang	25.450.000	1 orang	13.600.000	1 orang	12.572.000	1 orang	30.763.000	1 orang	33.839.000	1 orang	33.839.000		142.614.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bantuan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomi produktif	6082 orang	6082 orang	5.980.857.000	1600 KPM	1.564.900.600	1600 KPM	5.427.755.100	1600 KPM	19.184.057.040	1600 KPM	20.582.315.074	1600 KPM	20.582.315.074	1600 KPM	75.131.299.888	Dinas Sosial	
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	4482 keluarga	4482 keluarga	3.561.420.000	1990 keluarga	1.201.586.700	1990 keluarga	1.201.586.700	1990 keluarga	1.201.586.700	1990 keluarga	1.201.586.700	1990 keluarga	1.201.586.700		9.569.353.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1600 orang	1600 orang	3.426.437.000	1900 orang	361.313.900	1900 orang	4.226.169.400	1900 orang	17.982.486.400	1900 orang	19.780.728.374	1900 orang	19.780.728.374		61.561.856.348	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTRIFWANAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya**	**100%**	**100%**	**6.184.871.100**	**8,18 %**	**4.244.629.000**	**8,18 %**	**2.770.660.500**	**8,18 %**	**6.000.000.000**	**8,18 %**	**6.500.000.000**	**8,18 %**	**7.000.000.000**	**8,18 %**	**32.700.161.000**	**Dinas Sosial**	
		1.22.08.1.01	Seporan, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya serta terpeliharanya Monumen, Tetenger, Makam Pahlawan Nasional	100%	100%	6.184.871.100	8,18 %	4.244.629.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	8,18 %	30.429.500.500	Dinas Sosial	
		1.22.08.1.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesiapsiaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesiapsiaran	9 dokumen	9 dokumen	6.184.871.100	7 dokumen	4.244.629.000	n/a dokumen	0	n/a dokumen	0	n/a dokumen	0	n/a dokumen	0		30.429.500.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.22.08.1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan	n/a	n/a	0	n/a	0	8,18 %	2.770.660.500	8,18 %	6.000.000.000	8,18 %	6.500.000.000	8,18 %	7.000.000.000	8,18 %	22.270.660.500	Dinas Sosial	
		1.22.08.1.09.01	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen Tentang Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	n/a	n/a	0	n/a	0	6 dokumen	2.770.660.500	6 dokumen	6.000.000.000	6 dokumen	6.500.000.000	6 dokumen	7.000.000.000		22.270.660.500	Dinas Sosial	DIY
	Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat			**Persentase masyarakat sasaran yang memiliki nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial**	**N/A**	**N/A**		**26.00%**		**26.20%**		**26.26%**		**26.45%**		**26.45%**		**26.45%**		**Dinas Sosial**	
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial**	**1 Orang**	**1 Orang**	**12.000.000**	**0.00%**	**20.000.000**	**0.84%**	**30.000.000**	**1.07%**	**55.870.000**	**1.19%**	**62.557.000**	**1.19%**	**68.812.700**	**1.19%**	**250.239.700**	**Dinas Sosial**	
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	1 orang	1 orang		0.00 %		n/a		n/a		n/a		n/a		0.00 %			
		1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari TKA Dokerkai di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikosocial	1 orang	1 orang	12.000.000	1 orang	20.000.000	7 orang	30.000.000	9 orang	55.870.000	10 orang	62.557.000	10 orang	68.812.700	10 orang	250.239.700	Dinas Sosial	
				Terlaksananya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	1 orang	1 orang		1 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		1 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.06.03.1.01.02	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Ketenagakerjaan dari TKI Bermasalah di Daerah Provinsi untuk Diputangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Ketenagakerjaan yang Diputangkan dari TKI Bermasalah di Daerah Provinsi untuk Diputangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	12.800.000	5	28.080.000	5	30.080.000	5	56.870.000	5	62.557.000	5	68.812.700		250.239.700	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Penyelesaian pengadaan nilai-nilai kepemimpinan, kepahlawanan, kejuangan, keteladanan sosial dalam masyarakat**	**N/A**	**N/A**		**31.51%**	**606.660.000**	**33.68%**	**761.220.000**	**34.84%**	**884.620.000**	**34.84%**	**885.082.000**	**34.84%**	**885.082.000**	**34.84%**	**3.942.664.000**	**Dinas Sosial**	
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya pengadaan nilai-nilai kepemimpinan, kepahlawanan dan keteladanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.	6589 orang	6589 orang		6600 orang	606.660.000	6609 orang	761.220.000	6629 orang	884.620.000	7099 orang	885.082.000	7899 orang	885.082.000	7099 orang	3.942.664.000	Dinas Sosial	
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	23 Makam	23 Makam		23 Makam	606.660.000	23 Makam	761.220.000	23 Makam	884.620.000	23 Makam	885.082.000	23 Makam	885.082.000		3.942.664.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah			**Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**A**	**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**Dinas Sosial**	
		0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKDI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**89,98**	**89,98**	**77.575.421.434**	**90**	**86.826.066.953**	**90,18**	**97.042.179.231**	**90,28**	**104.753.216.292**	**90,38**	**113.882.063.042**	**90,38**	**115.121.888.962**	**90,38**	**536.081.178.430**	**Dinas Sosial**	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	189.400.000	12 bulan	88.893.790	12 bulan	96.983.000	12 bulan	110.896.500	12 bulan	121.986.150	12 bulan	121.986.150	12 bulan	587.145.100	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	134.800.000	2 Dokumen	35.693.790	2 Dokumen	34.983.000	2 Dokumen	44.346.500	2 Dokumen	48.781.150	2 Dokumen	48.781.150		343.368.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	24.267.000	2 Dokumen	16.000.000	2 Dokumen	17.600.000	2 Dokumen	20.240.000	2 Dokumen	22.275.000	2 Dokumen	22.275.000		154.647.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	26.450.000	2 Laporan	22.280.000	2 Laporan	24.420.000	2 Laporan	26.900.000	2 Laporan	29.990.000	2 Laporan	29.990.000		189.240.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	89.166.186.863	12 bulan	40.912.082.231	12 bulan	48.149.583.768	12 bulan	53.629.269.168	12 bulan	59.835.468.010	12 bulan	59.081.638.110	12 bulan	299.963.167.724	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.02.01	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	44.138.324.463	247 Orang/Bulan	40.647.570.231	247 Orang/Bulan	42.889.656.048	247 Orang/Bulan	53.687.106.409	247 Orang/Bulan	58.747.817.048	247 Orang/Bulan	58.747.817.048		298.570.075.224	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-		12 Dokumen	207.780.000	12 Dokumen	200.640.000	12 Dokumen	207.780.000	12 Dokumen	207.780.000	12 Dokumen	207.780.000		1.031.760.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD	n/a	n/a		n/a		1 Dokumen	3.240.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000		15.240.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.890.000	1 Laporan	9.660.900	1 Laporan	11.714.990	1 Laporan	11.700.700	1 Laporan	12.870.770	1 Laporan	12.870.770		66.957.840	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Tahun	1 Tahun	21.992.000	12 Laporan	47.258.280	12 Laporan	41.074.630	12 Laporan	45.182.500	12 Laporan	49.700.290	12 Laporan	54.670.300		259.877.200	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a		n/a		1 Laporan	2.925.200	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.300.000	1 Laporan	4.000.000		12.318.200	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan		12 bulan	86.480.000	12 bulan	87.840.000	12 bulan	87.840.000	12 bulan	87.840.000	12 bulan	87.840.000	12 bulan	437.760.000	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		6 Laporan	86.480.000	6 Laporan	87.840.000	6 Laporan	87.840.000	6 Laporan	87.840.000	6 Laporan	87.840.000		437.760.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	38.200.000	12 bulan	48.680.200	12 bulan	142.781.800	12 bulan	150.800.000	12 bulan	168.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	720.654.000	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.05.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	31 Orang	31 Orang	38.200.000	1 Dokumen	48.680.200	1 Dokumen	142.781.800	1 Dokumen	150.800.000	1 Dokumen	168.000.000	1 Dokumen	170.000.000		720.654.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.720.896.180	12 bulan	1.164.784.480	12 bulan	1.203.995.416	12 bulan	1.177.885.656	12 bulan	1.448.131.026	12 bulan	1.965.854.635	12 bulan	10.180.663.199	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	228.764.280	7 paket	139.253.320	7 paket	188.184.320	7 paket	301.376.000	7 paket	335.913.600	7 paket	335.913.600		1.133.401.840	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	242.337.800	7 paket	219.111.600	7 paket	279.448.200	7 paket	588.107.000	7 paket	616.017.000	7 paket	616.017.000		2.367.525.800	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	7 paket	120.955.000	7 paket	69.720.400	7 paket	119.627.400	7 paket	121.800.000	7 paket	130.000.000	7 paket	135.000.000		1.180.343.700	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	554.849.000	7 paket	16.787.000	7 paket	16.787.000	7 paket	20.215.400	7 paket	22.237.000	7 paket	24.468.700		655.176.100	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	150.328.200	7 paket	118.516.800	7 paket	130.051.720	7 paket	193.148.000	7 paket	212.455.000	7 paket	212.455.000		1.024.946.720	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	31.500.000	4 Dokumen	18.515.080	4 Dokumen	27.425.280	4 Dokumen	40.125.500	4 Dokumen	44.138.050	4 Dokumen	44.138.050		203.692.200	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	991.261.000	12 Laporan	855.424.000	12 Laporan	806.158.200	12 Laporan	532.127.750	12 Laporan	585.340.525	12 Laporan	585.340.525		2.585.986.800	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-		1 Dokumen	31.094.280	1 Dokumen	34.383.620	1 Dokumen	53.661.900	1 Dokumen	59.029.890	1 Dokumen	59.029.890		237.201.830	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	11.792.344.946	12 bulan	1.468.967.220	12 bulan	7.333.019.120	12 bulan	11.089.223.411	12 bulan	12.198.745.461	12 bulan	12.782.621.961	12 bulan	38.360.819.229	Dinas Sosial	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-		0	0	80 unit	600.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000		4.600.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	n/a	n/a		n/a	0	15 unit	37.580.000	18 unit	68.881.700	18 unit	106.481.700	18 unit	106.481.700		319.481.100	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	-	-		12 paket	118.283.200	7 paket	278.430.600	7 paket	144.310.472	7 paket	158.766.000	7 paket	174.642.500		875.432.872	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		84 unit	415.482.300	84 unit	1.112.331.820	84 unit	341.862.588	84 unit	378.358.845	84 unit	378.358.845		2.640.414.398	Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		3.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 unit	1 unit	8.574.890.630	1 unit	441.589.620	7 unit	2.603.887.000	-	4.515.720.000	-	4.067.292.000	-	4.067.292.000		20.079.101.290	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	604 Unit	604 Unit	3.187.114.818	19 Unit	472.712.300	-	1.389.751.100	-	1.595.224.400	-	6.155.846.033	-	6.155.846.033		20.037.305.517	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	8.950.131.908	12 bulan	9.462.782.800	12 bulan	13.012.273.053	12 bulan	12.930.586.521	12 bulan	13.673.845.282	12 bulan	13.673.845.282	12 bulan	63.103.304.038	Dinas Sosial DIY	
		3.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	11.666.808	12 Laporan	14.589.000	12 Laporan	16.548.000	12 Laporan	18.833.900	12 Laporan	22.917.500	12 Laporan	22.917.500		113.463.981	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1.384.308.908	12 Laporan	1.291.704.000	12 Laporan	1.542.132.000	12 Laporan	1.808.457.448	12 Laporan	1.987.103.159	12 Laporan	1.987.103.159		9.719.768.768	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	7 laporan	7.629.256.808	7 laporan	8.154.499.800	7 laporan	9.559.532.013	7 laporan	10.469.295.171	7 laporan	11.663.624.089	7 laporan	11.663.624.089		49.269.302.089	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	18.752.872.642	12 bulan	2.892.542.482	12 bulan	3.980.181.708	12 bulan	24.846.486.940	12 bulan	27.298.346.734	12 bulan	27.298.891.734	12 bulan	86.151.284.140	Dinas Sosial	
		3.00.01.1.09.018	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	1.230.500.857	362 unit	851.644.800	362 unit	949.914.800	362 unit	1.318.937.626	362 unit	1.458.838.729	362 unit	1.458.838.729		6.347.463.141	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116 unit	116 unit	1.077.017.908	116 unit	1.260.521.100	116 unit	1.480.064.509	116 unit	1.552.741.832	116 unit	1.713.516.017	116 unit	1.713.516.017		8.812.377.425	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	0	33 unit	4.120.000	33 unit	4.120.000	33 unit	4.575.000	33 unit	5.470.000	33 unit	6.017.000		24.480.000	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	0	316 unit	216.287.500	316 unit	247.257.400	316 unit	310.000.000	316 unit	350.000.000	316 unit	350.000.000		1.473.544.900	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		3.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 unit	39 unit	8.441.349.675	1 unit	459.979.000	7 unit	1.079.779.000	-	21.816.845.892	-	23.778.529.168	-	23.778.529.168		70.753.907.973	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		4.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTABILAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**n/a**	**n/a**	**0**	**n/a**	**0**	**75%**	**350.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**n/a**	**0**	**n/a**	**0**	**100%**	**450.000.000**	**Dinas Sosial**	
		4.01.10.1.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya implementasi budaya pemerintahan	n/a	n/a	0	n/a	0	100%	350.000.000	100%	100.000.000	n/a	0	n/a	0	100%	450.000.000	Dinas Sosial	
		4.01.10.1.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	n/a	n/a	0	n/a	0	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	100.000.000	n/a	0	n/a	0		450.000.000	Dinas Sosial	DIY
	Terwujudnya kesiapsiagaan bencana (pra, pas, dan pasca)			**Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Tenaga Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelayan Perdamaian (TPP)**	**NA**	**NA**		**60.70%**		**61.03%**		**61.03%**		**61.36%**		**61.30%**		**61.30%**		**Dinas Sosial**	
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar**	**1735 orang**	**1735 orang**	**2.908.142.808**	**60.70%**	**2.079.884.800**	**61.03%**	**2.121.409.800**	**61.03%**	**5.503.456.915**	**61.36%**	**6.053.802.607**	**61.30%**	**6.186.790.000**	**61.30%**	**21.857.888.122**	**Dinas Sosial**	
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksanaya kesiapsiagaan bencana dan terlindungnya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	1735 orang	1735 orang	2.908.142.808	1735 orang	2.079.884.800	1785 orang	2.121.409.800	1785 orang	5.503.456.915	1820 orang	6.053.802.607	1820 orang	6.186.790.000	1820 orang	21.857.888.122	Dinas Sosial DIY	
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan Jiwa Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100600 orang	100600 orang	816.684.808	100600 orang	257.877.500	100600 orang	277.517.800	100600 orang	713.000.000	100600 orang	785.200.000	100600 orang	785.200.000		3.234.178.100	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Selimut/kain jarik yang Terindis pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	150 orang	150 orang	83.608.808	150 orang	66.130.000	150 orang	88.835.800	150 orang	145.200.000	150 orang	159.720.000	150 orang	0		472.485.080	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	8 unit	8 unit	867.671.808	8 unit	58.141.500	9 unit	59.247.600	10 unit	805.000.000	10 unit	885.500.000	10 unit	885.500.000		2.422.862.100	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	210 orang	210 orang	181.370.808	210 orang	127.225.000	210 orang	133.270.800	215 orang	196.020.000	215 orang	215.622.000	215 orang	236.888.000		1.098.207.000	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1365 orang	1365 orang	1.981.037.808	1365 orang	1.579.930.800	1365 orang	1.596.500.200	1215 orang	3.843.336.915	1215 orang	4.227.670.607	1215 orang	4.700.000.000		17.829.435.522	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Total							**217.434.136.230**		**93.302.081.873**		**114.034.814.731**		**188.507.157.658**		**208.812.316.121**		**209.074.548.061**		**991.165.404.164**		

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

"Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Pada halaman selanjutnya"

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran Dinas

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Keterangan
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	N/A	21.00%	21.22%	21.51%	28.32%	21.57%	21.57%	
2	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	N/A	26.05%	26.20%	26.26%	26.43%	26.43%	26.43%	
3	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	N/A	60.70%	61.03%	61.03%	61.36%	61.36%	61.36%	
4	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (87.97)	A	A	A	A	A	A	

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2027-2027 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana arah perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dan apa yang hendak dicapai dalam tiga tahun mendatang (2022-20267), bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Perencanaan Strategis inilah yang akan mewarnai kiprah Dinas Sosial DIY pada masa yang akan datang secara terencana dan terarah.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022-2027 disusun dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya dengan melalui Dana APBD/APBN, Dana Keistimewaan maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Melalui Rencana Strategis 2022-2027 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial DIY dalam konstelasi penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (1) komitmen pimpinan; (2) konsistensi kebijakan dinas sosial DIY dan Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota; serta (3) kepedulian dan peran serta masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha.

Rencana Strategis ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial DIY dan masyarakat, termasuk dunia usaha baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan inovasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat sepanjang tidak menyimpang dari kebijaksanaan yang digariskan.

Yogyakarta, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si

NIP. 19660404 199303 2 007

2023

DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta